

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah ekonomi dunia, negara-bangsa sebagai salah satu pelaku utamanya mengalami pasang surut dalam legitimasi dan peranannya terhadap perekonomian baik secara domestik maupun global. Negara-bangsa pada satu tahap mempunyai peranan yang sangat dominan, dan sangat menentukan, tapi pada tahapan lain ia bahkan tidak mempunyai legitimasi yang kuat untuk berperan aktif dalam perekonomian itu sendiri.

Tahapan pertama terbentuk seiring dengan tumbuhnya kapitalisme. Dapat dilihat sejak Adam Smith melaunching konsep free fight competition-nya. Smith dalam bukunya: *An Inquiry Into the Nature and Causes of Wealth of Nation*, mengagas wacana de-etatisasi, swastanisasi, menyerahkan kekuasaan ekonomi pada mekanisme pasar. Kekuasaan pasar yang disebutnya sebagai *invisible hand*, akan menjamin maksimalisasi laba. Gagasan ini kemudian diperkuat dan di elaborasi lebih lanjut oleh para pemikir setelahnya seperti Thomas Malthus, David Ricardo, dan J.S. Mill. Tokoh-tokoh inilah yang merupakan eksponen klasik yang menumpukan basis analisisnya pada mekanisme pasar dan ekonomi Makro.

Gagasan Smith adalah gagasan tandingan terhadap ekonomi merkantilis dan filsafat politik feodalisme. Smith mengatakan bahwa negara tidak *accountable* jika

sosial massifnya KKN dalam birokrasi negara pra-revolusi industri. Formasi sosial yang terbentuk pra-Smith tersebut kemudian melahirkan gerakan sosial yang memandang negara sebagai bagian kekuasaan feodal. Karena itu, negara menjadi salah satu kekuatan yang harus ditelanjangi agar tidak lagi menjadi agen feodal. Pendek kata negara dijauhi dan diisolir sebagai aktor sosial. Secara perlahan pada perkembangan berikutnya gerakan sosial yang ada membangun suatu garis yang lebih tegas antara negara dan masyarakat. Pada masa ini berbagai teori politik, social hingga masyarakat sipil bermunculan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokrasi politik mulai di introdusir, ekonomi liberal pun mulai berjalan, yang keduanya sama-sama bertumpu pada filsafat liberalisme.

Gagasan liberalisme diatas juga melahirkan suatu formasi sosial, yang disebut formasi sosial liberal, yang berjalan hingga perang dunia kedua. Dalam formasi sosial liberalistic ini ternyata juga tumbuh berbagai ketidak-adilan, eksploitasi, penindasan, hingga Imperialisme. Dari kaca mata kaum liberal formasi sosial tersebut dianggap bermasalah yang ditandai dengan terjadinya depresi ekonomi dunia, pada tahun 1929 saham-saham di Wallstreet hancur berantakan. Depresi ekonomi dunia merangsang lahirnya paradigma ekonomi baru yang disebut sebagai ekonomi Keynesian. Pada era liberal kekuasaan feodalisme aristokratik dibongkar dan diserahkan pada swasta; yang kemudian hari terbukti hanya terjadi pergantian aktor, pada masa pra-smith eksploitasi ekonomi dilakukan oleh kaum feodal, sedangkan masa liberal hal tersebut diageni pemilik kapital (kapitalis), maka pasca depresi ini kepercayaan terhadap pasar

.....

percaya sepenuhnya, terbukti ekonomi yang di pegang swasta terpuruk. Maka dipanggillah negara kembali, yang dikemudian hari juga menstrukturkan suatu formasi sosial lain, yang kita sebut saja tahap kedua.

Pemikir yang memberikan basis konseptual terhadap negara adalah John Maynard Keynes dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest and Money*. Pemikirannya bertumpu pada analisis terhadap campur tangan pemerintah dan dasar-dasar teori ekonomi makro modern. Dimulailah kerjasama kegiatan ekonomi dan politik antara pasar dan Negara. Di tingkatan praksis, suatu fakta penting yang mengantar perkembangan kapitalisme pada tahap-tahap selanjutnya, adalah hegemoni dan dominasi Amerika dalam penyusunan tata ekonomi dunia pasca perang. Pada kekuatan aktor inilah sebenarnya cikal bakal neoliberalisme dapat dilacak. Persinggungannya dengan ekonomi Keynes, berimpit pada rasionalitas penyiapan blok historis baru kapitalisme, didalamnya terdapat Marshall Plan dan Bretton Woods sebagai manifestasinya.

Pada paradigma Keynesian negara menjadi kekuatan sosial yang dipersilahkan untuk melakukan intervensi terhadap ekonomi dan politik. Kritik mendasarnya atas keyakinan ekonom klasik bahwa pasar bebas yang kompetitif dengan sendirinya akan mencapai titik equilibrium antara sumber daya dan tenaga kerja tidaklah benar. Ini terjadi karena tidak terorganisasikannya aksi-aksi antar

Dalam konteks itulah intervensi negara dalam pengertian Keynes lahir terwujud. Kehadiran negara diyakini dibutuhkan untuk mengatasi problem ketidakmungkinan equilibrium dan mengorganisasikan aksi-aksi individu di atas. Penciptaan sektor produksi massal bagi terciptanya full employment dibutuhkan dalam kerangka ekonomi berbasis demand yang kemudian tanggung jawab ini dianggap tanggungan negara. Dalam konteks social, manajemen ekonomi Keynesian yang berbasis pada model pembangunan negara, adalah upaya strukturisasi penyelesaian konflik social antara negara dan masyarakat dengan menciptakan infrastruktur sosial produksi dan konsumsi massal sementara, yang pada tahapan selanjutnya menciptakan aliansi segi tiga (tripartite) antara bisnis besar konglomerasi, negara, dan buruh. sterilisasi buruh dilakukan dengan menghapuskan garis politik radikal-kiri, yang bekerja bersama-sama demi "pertumbuhan".

Hampir dimana-mana negara menjadi pelaku penting dalam ekonomi kapitalis semenjak dekade 1930-an sampai dengan tahun 1970-an. Doktrin-doktrin yang digunakan untuk membenarkan peranan ini berbeda-beda dari satu negeri ke negeri yang lain. Diberat, doktrin Keynesian menjadi pilar ideologis utama, Keynes adalah seorang pemikir borjuis yang mengira intervensi negara telah menjadi satu-satunya tiang bergantung guna mempertahankan kapitalisme dalam depresi tahun 1930-an. Di blok timur, dan kalangan kaum yang mengagumi metode-metode Soviet di barat dan dunia ketiga bercokolah doktrin-doktrin stalinis. Didunia ketiga, teori-teori

Pada formasi sosial semacam itulah gerakan sosial memandang hegemoni kapitalisme global dan struktur negara yang tidak adil menjadi aktor determinan yang mewujudkan ketidakadilan sosial. Kapitalisme global menarik negara sebagai bagian dari front kekuatannya, proses penarikan ini dilakukan, salah satunya, dengan menciptakan komprador-komprador. Akan tetapi, dalam formasi sosial ini bukan semata melahirkan kesuraman sosial, namun juga melahirkan temaram cahaya, walau hanya sebesar lampu senter. Sebab campur tangan negara secara evolusi juga ditransformasikan menjadi kepedulian negara terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Negara menciptakan lapangan kerja massal (padat karya), memberikan subsidi sosial mulai dari pendidikan sampai penghidupan. Ahli teori negara menyebutnya sebagai negara kesejahteraan (welfare-state) yang muncul di AS dekade 60-an. Dan dari sudut lain, walau samar-samar disebutkan bahwa ini merupakan hasil adaptasi kapitalisme terhadap kritik-kritik tajam kaum kiri.

Dalam perkembangannya, kerangka kerja Keynesian juga memiliki berbagai kelemahan-kelemahan fundamental. Dua diantara yang terpenting adalah persoalan stagflasi dan ketidakpastian masa depan ekonomi. Kelemahan-kelemahan tersebut mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru mulai dari post keynesian economic, rezim moneter internasional, rational expectations, hingga supply side economists.

Memburuknya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dan tingginya tingkat inflasi tahun-tahun 70-an mendorong terjadinya perdebatan ulang dan perebutan

istilah kanan baru (New Right). Tingginya inflasi ini dipandang para intelektual kanan baru sebagai produk ekspansi uang dan kredit, yakni suplay uang upah yang pernah jaya dalam melangsungkan boom peledak ekonomi, pasca perang dan untuk komitmennya pada Full Employment serta pemerataan kesejahteraan. Keterpurukan ekonomi diyakini kaum kanan baru sebagai akibat intervensi Negara yang terlampau dalam terhadap perekonomian yang mengakibatkan hilangnya karakter pasar sehingga menghambat mekanisme pasar bekerja. Di titik inilah awal kembalinya pasar menjadi agenda utama aliran kanan baru. (peletak dasar kanan baru ini adalah pemikir Von Hayek yang diteruskan oleh muridnya Milton Friedman, yang pernah memimpin langsung eksperimentasi resep ekonomi neoliberal di Argentina, yang dikemudian hari terbukti justru hancur berkeping-keping.

Baru saat itulah kelas-kelas penguasa serta para intelektual yang melayani kelas itu tiba-tiba meninggalkan doktrin-doktrin lama dan menyambut teori baru, yang mula-mula dijuluki “moneterisme”, kemudian Thatcherisme” atau “Reaganomics” dan sekarang sudah di cap dengan julukan “Neo-Liberalisme”.

Neo-liberalisme adalah sebuah Ideology yang berkembang dari ideology Liberalisme. Yaitu sebuah ideology yang menolak intervensi Negara. Kita di ajak kembali gagasan ortodok yang bercokol sebelum depresi tahun 1930-an. Yang dianjurkan oleh Adam Smith dan dipopularisasikan oleh Jean-Baptiste Say. Gagasan ini dikenal sebagai "liberalisme ekonomi" waktu itu, jadi versi baru dikenal dengan nama "neo-liberalisme". Para penyokongnya mau menurunkan pajak dari profit-profit

... dan ...

regulasi yang mengurus tindakan perusahaan-perusahaan, serta menghapuskan semua proteksi ekonomi yang dilakukan melalui bea cukai.

Menurut argumentasi mereka (Neo-liberalisme), segala intervensi Pemerintah di dunia ekonomi semenjak tahun 1930-an hanya mengakibatkan industri-industri menjadi pemboros yang tidak efektif dan efisien. Ambruknya Uni-Soviet, serta kemandegan dan kesengsaraan Amerika Selatan dan Afrika, menurut mereka telah membuktikan betapa celakanya konsekwensi intervensi Pemerintah. Kemiskinan di dunia ketiga hanya dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan pasar bebas yang tak kenal ampun, melalui kegiatan WTO, IMF dan Bank Dunia.

Jika usaha-usaha ekonomi di"bebas"kan dari kontrol yang "semena-mena" itu, kata mereka nasib umat manusia bisa diperbaiki secara menyeluruh. Modal dapat mengalir dengan leluasa ke mana saja diperlukan, sehingga barang-barang dan jasa-jasa akan dihasilkan di tempat yang paling pantas. Modal yang sudah terakumulasi tidak akan lagi tertambat dalam industri-industri "berkarat" yang tak berdayaguna, dan "monopoli tenaga kerja" yang dikuasai oleh serikat-serikat buruh jahat tidak lagi bisa menghalangi kenaikan produktivitas kerja secara "dinamis". Daerah-daerah dunia masing-masing dapat mengkhususkan dalam bidang produksi di mana mereka lebih mampu. Boleh jadi melalui proses-proses ini kaum kaya akan menjadi lebih kaya lagi, tetapi tidak apa-apa, karena lewat pertumbuhan penghasilan ekonomi

Aparatus-aparatus negara adalah lembaga-lembaga yang kadaluarsa, yang tidak sanggup lagi menghalangi perusahaan-perusahaan berpindah-pindah guna mencari keuntungan. Bila pemerintah ngotot berusaha melakukan proteksi yang demikian, ekonomi mereka cuma akan menjadi ekonomi "terkepung", dan bagaimanapun juga mereka tidak bisa melakukan hal itu karena para pemilik modal terlalu cerdas dan selalu akan mengelabui pemerintah-pemerintah tersebut.

Tapi yang menjadi persoalan apakah sebenarnya yang dikatakan oleh-oleh santri-santri neo-liberal itu terbukti bahwa negara menjadi lemah karena dampak dari aktor-aktor neo-liberal seperti IMF, WTO, World Bank Dan TNC? Atau malah sebaliknya menjadikan negara itu semakin kuat dan semakin menjadi institusi poros yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi dunia?

Kita dapat melihat hasil dari perkembangan Neo-Liberalisme dan kapitalisme global sekarang ini menyebabkan kemiskinan global yang akut dimana hanya sebagian kecil masyarakat dunia yang menikmatinya, dan konsep trickle down effect yang dikembangkan oleh Negara-negara imperialisme pun tidak benar-benar menetes kekalangan grass root sebagai mana yang diharapkan, tapi hanya mandek di atas tertahan dikalangan borjuasi saja.

Dalam perkembangan kelompok-kelompok kaum kapitalis Internasional dan persaingannya dalam merebut dan mempertahankan pasar, kekuasaan Negara seperti G3 (Amerika, Uni-eropa dan Jepang), tidak akan lenyap dan memudar, tapi yang lenyap hanyalah peranannya sebagai sebuah instrument persaingan, sedangkan

... ..

modal imperialis dalam perjuangan kelas antara modal dan tenaga kerja akan lantang dibandingkan sebelumnya.

Kita bisa melihat Negara yang paling getol mempromosikan globalisasi, Amerika Serikat. Keluarga Bush memiliki perusahaan minyak, saat ini memegang monopoli minyak di Bahrain, juga perusahaan konsultan persenjataan dan klub Baseball. Keluarga Cheney (Wapres AS sekarang) merupakan salah satu pemegang saham utama di perusahaan pemasok teknologi perminyakan, Ini bisnis milyaran dolar. Menteri luar negeri AS, Collin Powell, juga memegang saham diberbagai perusahaan energi satu bukti yang menyolok bahwa ada peleburan antara bisnis dan politik¹

Tidak ada bukti perihal adanya kemunduruan peranan negara-negara bangsa sebagai senjata persaingan antar-kapitalis. Sebaliknya, semenjak akhir perang dingin telah terjadi intensifikasi penggunaan kekuasaan negara, khususnya oleh para kapitalis AS, untuk meningkatkan kepentingan ekonominya melawan rival mereka dari Jepang dan Eropa barat. Contoh yang paling besar adalah konflik dalam hal perjanjian Helms-Burton dalam kongres AS. Perjanjian tersebut mengizinkan mantan para pemilik perusahaan yang diambil alih oleh negara kuba untuk memboikot perdagangan luar negeri dengan kuba sebagai kompensasinya. Ini tidak hanya mendorong gelombang protes dari pemerintahan-pemerintahan maju lainnya, yang

¹ Dikutip dari artikel "*Negara dan globalisasi upaya mematahkan sebuah Mito*".

telah menolak menyetujui sanksi hukum terhadap cabang-cabang perusahaan AS di Negara-negara masing-masing.

Undang-undang Helms-Burton tidak sekedar membantu dalam hal mengetatkan blokade ekonomi AS terhadap Negara sosialis kuba. Ini dirancang oleh para lawyer dari perusahaan penyulingan alkohol Bacardi, yang terkenal dengan rum putihnya (non-kuba). Sasaran utama Bacardi adalah perusahaan Pernod-Richard dari Perancis. Yang telah melakukan negosiasi yang menghasilkan deal-deal besar bagi kuba untuk menyediakan sulingan rum bagi operasi pemasaran diseluruh dunia.

Sekarang ini negara-negara berperang dengan mengerahkan pasukan mereka yang terdiri dari para pelaku bisnis internasional dan juga birokrasi yang mereka miliki. Strategi yang dipakai juga mirip pada masa lampau, membentengi diri sambil menyerang lawan. Tentu saja negara-negara maju (AS, Jepang, Eropa Barat) rata-rata memenangkan peperangan ini jika mereka berhadapan dengan Negara yang belum maju.²

Persaingan terbuka antara perusahaan-perusahaan transnasional AS dan Eropa Barat juga berakar pada perjanjian D'Amato-Kenedy yang menyetujui sanksi pengadilan AS terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi dan perdagangan untuk bidang minyak dengan Iran dan Libya. Perusahaan-perusahaan ini termasuk total dari Perancis, konglomerat minyak dan Gas Italia Agip, Petrofina dan Belgia dan Verba dari Jerman. Perusahaan lain yang jadi sasaran adalah ENI, perusahaan Negara Italia yang bergerak dalam bidang energi, yang telah

² 02 April 2000

menginvestasikan sebanyak US\$6 milyar dalam pembangunan pipa Gas Libya. Dalam menanggapi isi perjanjian D'Amato-Kenedy oleh kongres AS, komisi Eropa menerapkan sebuah "Black List" pada perusahaan-perusahaan AS untuk dijadikan sasaran, sebagai sanksi balasan oleh pengadilan-pengadilan di Eropa.

Dalam persaingan antar-imperialis untuk akses terhadap pasar dan peluang investasi sama sekali tidak ada garis pemisah antara penggunaan kekuatan hukum, diplomatik dan militer. Pemerintah AS menggunakan baik kekuatan diplomatik maupun kekuatan militernya pada bulan September 1996 untuk membendung rencana PBB "food for Oil" untuk Irak yang merupakan inisiatif Prancis. Dibawah rencana itu, Irak diizinkan menjual sampai \$2 milyar minyaknya setiap 6 bulan untuk membeli makanan dan obat-obatan. Banque Nationale de Paris yang akan menangani rekening hasil penjualan minyak Irak didepositokan. Washington telah memblokade persetujuan rencana ini dengan Dewan Keamanan PBB selama lebih dari satu tahun. Pada bulan mei rencana ini terpaksa disetujui. Namun, hanya menjelang rencana ini dilaksanakan, Washington menggunakan peningkatan intervensi Baghdad dalam konflik rivalitas Partai-partai borjuis kurdi di Irak utara untuk memproklamirkan bahwa Baghdad melanggar traktat antara Kuwait dan Saudi Arabia. Clinton memerintahkan serangkaian serangan Amerika dengan sasaran Irak Utara dan secara sepihak menyatakan bahwa rencana "food for oil" PBB ditunda. Pada bulan desember 1996, pemerintahan AS membiarkan rencana PBB tersebut dilaksanakan, tetapi dengan satu perubahan yang tidak signifikan, yaitu hasil penjualan minyak Irak tidak

akan lagi didepositokan disebuah bank di Paris, tetapi gantinya akan didepositokan disebuah bank di New York

Pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IMF, World Bank menjadi sebuah wadah dan fasilitas untuk melakukan intervensi terhadap ekonomi. Begitu juga dengan pengerahan Militer dalam pembukaan negara-negara yang mempunyai sumber daya alam, ataupun sebagai pembukaan pasar-pasar bagi produknya. Dan juga sebagai alat represif dalam menjaga keamanan demi terciptanya iklim investasi yang aman dan nyaman bagi investor dan penguasa modal.

Dari pemaparan diatas sangat jelas terlihat bahwa adanya ketidak sesuaian antara apa yang disampaikan oleh para pemikir neo-liberalisme dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena terbukti ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi regionalnya, maupun secara global.

B. Perumusan Masalah

“Bagaimanakah peran Negara sebagai salah satu aktor ekonomi dalam tatanan ekonomi regional maupun global pada masa Neo-Liberalisme?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks kekinian, kita tidak melihat bahwa negara menjadi lemah dan tidak mempunyai peran terhadap perkembangan perekonomian global sekarang ini,

keuangan Robert Rubin memberikan tekanan utama pada ekspansi ekonomi dunia sebagai basis bagi kemakmuran kelas kapitalis global. Misalnya, pada pertengahan tahun 1990-an, mereka mendorong kebijakan Dolar menguat yang dimaksudkan untuk merangsang pemulihan ekonomi Jepang dan Jerman, sehingga mereka bisa berfungsi sebagai pasar bagi barang dan jasa Amerika Serikat. Di lain pihak pemerintahan Reagan sebelumnya yang lebih nasionalis, telah memberlakukan kebijakan dolar yang melemah guna memperoleh kembali tingkat persaingan ekonomi Amerika Serikat dengan mengorbankan ekonomi Jerman dan Jepang. Bersama dengan George W. Bush, kembali kedalam kebijakan ekonomi, yang menganut kebijakan dolar melemah, ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali ekonomi Amerika Serikat atas biaya ekonomi negara-negara lainnya, dan mendorong kepentingan elite perusahaan Amerika dengan mengabaikan kelas kapitalis global dibawah kondisi merosotnya dunia.⁵

Walden Bello mengemukakan pikirannya dalam sebuah bukunya yang berjudul De-Globalisasi, bahwa dimana negara menjadi sebuah institusi Regulator dan protektor yang penting dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian negaranya sendiri (terutama negara Maju). Ini diwujudkan (Negara) dalam lembaga-lembaga internasional seperti WTO, IMF, dan World Bank.

WTO (World Trade Organization) dan berbagai perjanjiannya tidak melayani kepentingan negara sedang berkembang, tetapi kepentingan dunia industri negara

... ..

melahirkan WTO pada tahun 1995, melainkan penilaian Negara maju dan Amerika Serikat bahwa kepentingan berbagai korporasinya tidak lagi terlayani oleh GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang sangat longgar. Itulah sebabnya negara-negara maju membutuhkan kehadiran suatu badan yang sangat kuat dan luas ruang lingkungannya, seperti WTO. Dari paradigma pasar bebas yang menjadi landasannya, sampai pada perangkat aturan dan regulasi yang dirancang bisa berlaku sepanjang masa dalam berbagai persetujuan GATT tentang putaran Uruguay, bahkan hingga mencakup sistem pembuatan keputusan dan pertanggung-jawabannya. WTO adalah sebuah cetak biru hegemoni global dari Korporasi Besar bernama Negara-negara maju dan Amerika Serikat (Corporate Amerika)⁶

Munculnya pernyataan bahwa WTO diperlukan adalah salah satu kebohongan terbesar di zaman ini. Diterimanya WTO tidak lain disebabkan prinsip propaganda yang serupa yang dipraktekkan oleh Joseph Goebbels: “jika anda sesering mungkin melakukan kebohongan, maka kebohongan itu akan dianggap sebagai kebenaran”. Ketika perundingan putaran uruguay tengah berlangsung, antusiasme negara-negara sedang berkembang akan proses tersebut sangatlah kurang. Bertindak sebagai penonton pasif yang masif, dan bahkan banyak sekali yang tidak terwakili selama negosiasi dikarenakan keterbatasan sumber daya, negara-negara sedang berkembang terseret kedalam pemberian dukungan nir-antusias atas persetujuan Marrakesh yang mengesahkan putaran uruguay dan mendirikan WTO. Untuk menjual WTO ke

⁶ Dikutip dari buku *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, IFG, Cindelas 2003 dalam artikel

Selatan, para propogandis Amerika Serikat membangkitkan ketakutan bahwa apabila mereka tidak mau bergabung dengan WTO, negara yang bersangkutan akan diisolir dari perdagangan dunia (seperti korea utara). Lebih jauh, mereka juga mengumbar janji bahwa sistem yang berbasis pada kaidah perdagangan dunia semacam itu akan melindungi negara-negara lemah dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh penguasa- penguasa besar perdagangan.⁷

Pada saat kondisi perekonomian mereka di dominasi oleh IMF dan Bank Dunia, mayoritas negara sedang berkembang merasa seakan-akan mereka tidak mempunyai pilihan lain, kecuali membubuhkan tanda tangan mereka pada sebarisan titik-titik (the dotted line). Selang beberapa tahun kemudian, mereka baru tersadar mereka terlanjur membubuhkan tanda tangan, yang demikian membuang seluruh hak mereka untuk menerapkan berbagai aturan perdagangan yang sangat penting bagi tercapainya tujuan pembangunan. Mereka juga baru sadar bahwa ternyata sepak terjang WTO, pada hakikatnya adalah anti Pertumbuhan negara-bangsa memang terkait erat dengan pertumbuhan kapitalisme.

Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Neo-liberalis tentang tidak boleh adanya intervensi dan proteksi sebuah negara terhadap perdagangan, karena hanya akan menghilangkan efektifitas dan efisiensi perekonomian itu sendiri, ternyata tidak terbukti. Dengan sangat aktifnya negara-negara pencipta Neo-liberalis tersebut

... menjadi konsekuensi dalam perdagangan

Kemudian **Alan Wood** memberikan contoh IMF dan Bank Dunia yang menurutnya merupakan agen modal nasional dari negara-negara Imperialis. Baginya, sulit untuk memahami globalisasi tanpa mempertimbangkan kompetisi di antara ekonomi-ekonomi nasional dan negara yang mempromosikan "persaingan internasional", memelihara dan mengembalikan profitabilitas dari modal domestik, mempromosikan pergerakan bebas modal sementara tetap mengurung tenaga kerja di dalam batas-batas negara, agar bisa didisiplinkan oleh negara, dan menciptakan dan memelihara pasar global, dsb. Termasuk kebijakan-kebijakan nasional yang menembus batas-batas kedaulatan nasional. Menurut Wood, kata-kata Marx bahwa kapitalis tidak memiliki kebangsaan, mempunyai arti bahwa kapitalis tidak memiliki loyalitas nasional, bukan berarti bahwa kapitalis tidak memiliki akar nasional atau kebutuhan akan negara, terutama negara-bangsa mereka sendiri.⁸

Untuk dapat menguasai, mengintervensi dan menentukan kebijakan-kebijakan negara-negara lain yang sesuai dengan keinginan dan kebijakannya, negara kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh **Susan Strange** sebagai **Konsep Struktural Power**. dimana negara melakukan hegemoni dengan cara menguasai empat alat hegemoni, yaitu : *Security, Production, Financial and Knowledge*. dimana kemudian negara-negara yang tidak mempunyai empat unsur dari struktural power tersebut tidak dapat melakukan apa-apa kecuali melakukan apa yang ditekankan oleh negara-negara yang mempunyai empat sumber daya signifikan itu.

⁸ Dikutip dari "Merawat Mimpi Globalisasi" Oleh B Herry Priyono. Dalam situs
www.merawatmimpi.com/2005/03/12/12-03-2005

Menurut Susan Strange dalam bukunya " States and Markets : an Introduction to International political Economy", Structural power didefenisikan sebagai :

*"The power to shape and determine the structures of the global political economy within which other states, their political institutions, their economic enterprises and (not least) their scientist and other professional people have to operate, rather more than confers the power to decide how things shall be done, the power to shape framework within which state relate to each other, relate to people, or relate to corporate enterprise"*⁹

Empat unsur yang dapat dilakukan untuk menentukan dan membentuk keinginan yang diinginkan oleh negara yang mempunyai sumber daya ini adalah:

1. Keamanan (Security)

*"So long as the possibility of violent conflict threatens personal security, he offers others protections againts that threat is able to exercise in other non-security matters"*¹⁰

Berdasarkan dari pendapat susan strange diatas bahwa individu atau negara yang dapat menjamin keamanan, ataupun memberikan pelatihan militer baik itu individu maupun negara, maka ia dapat mengintervensi kebijakan individu ataupun negara tersebut. Dan jika kita benturkan dengan negara yang mempunyai sumber daya Militer yang kuat, kemudian negara itu

⁹ Dikutip dari "buku States and Markets" oleh Susan Strange tgl terbit 1989, Pinter Publishers, London hal 24

¹⁰ Ibid hal 29

menawarkan bantuan keamanan terhadap negara lain dan ia mampu menjamin keamanan negara lain tersebut, sehingga negara lain yang sebelumnya merasa terancam terselamatkan oleh negara tersebut. Bantuan keamanan ini dapat berupa program pelatihan sistem keamanan, sistem pendistribusian barang ataupun tata pelaksanaan peradilan. Semakin tinggi ancaman yang dirasakan oleh sebuah negara maka akan semakin menguntungkan negara pemilik keamanan struktural tersebut. Dimana negara yang terancam akan merasa berhutang budi kepada negara pemberi keamanan atau dengan kata lain negara tersebut harus membayarnya dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan negara pemilik struktural power.

2. Produksi (Production)

*"Who decides what shall be produced, by whom, by what means and with what combination of land, labour and technology.... can use its structural power over production to consolidate and defend its social and political power, establishing constitutions, setting up political institutions and laying down legal and political processes and precedents that make hard for other to challenge upset."*¹¹

Berdasarkan dari pemaparan diatas mengatakan bahwa siapapun, baik itu individu maupun negara mampu mempengaruhi gaya produksi individu atau negara lain. Disebabkan keunggulan dalam produksinya ataupun

ketergantungan produksi suatu individu atau negara lain terhadap individu ataupun negara yang mempunyai sumber daya produksinya. Jika dilihat konteks negara dalam mempengaruhi gaya produksi negara lain, dimana produksi merupakan kombinasi dari tenaga kerja, teknologi, modal dan sumber daya alam. Dengan kemampuan struktural produksi negara tersebut akan berusaha menetapkan konstitusi, pengetahuan atas institusi politik dan proses administratif negara lain, sehingga apa saja yang diproduksi oleh negara tersebut dapat mendukung ekonomi dunia bukan merupakan produk kebutuhan domestik/lokal. Lebih jauh lagi dengan kemampuan struktural produksi tidak hanya mempengaruhi bentuk produksi tapi juga mempengaruhi budaya, ideologi dan bahasa.

3. Keuangan (Financial)

“Who ever can gain the confidence of other in their ability to create credit will control a capitalist or in deed a socialist economy”¹²

Berdasarkan pemaparan diatas mengatakan mengatakan bahwa negara atau individu yang dapat memberikan bantuan modal terhadap negara atau individu negara lain maka ia bisa mengintervensi sistem kapitalisnya ataupun lebih dalam lagi sosial ekonominya. Masing-masing negara berusaha lebih unggul dalam meningkatkan industri ekonomi mereka. Namun baik negara maju maupun negara berkembang, finansial dan kontrol kredit adalah satu hal

yang paling penting di dalam hubungan ekonomi internasional dan di dalam kompetisi perusahaan dewasa ini. Dalam hal ini negara-negara yang mampu menghimpun modal dengan baik adalah negara yang paling diuntungkan. Kondisi negara-negara berkembang menuntut mereka untuk meningkatkan industri ekonomi mereka. Namun disatu sisi mereka sangat kekurangan modal, peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara yang kaya modal untuk mengendalikan negara-negara yang membutuhkan modal dengan memberikan kredit modal.

4. Pengetahuan (Knowledge)

“Knowledge is power, whoever is able to develop or ocquire and to deny access of other to a kind of knowledge respectedand sought by others will exercise a very special kind of structural power”¹³

Berdasarkan dari pemeparan mengatakan bahwa individu atau neagra yang mempunyai keunggulan dalam bidang pengetahuan, kemudian negara atau individu lain membutuhkannya maka ia dapat melakukan intervensi ataupun imbalan atasnya. Keberadaan ilmu pengetahuan adalah sangat penting, terutama ilmu pengetahuan yang menyangkut tekhnologi, peningkatan produksi, menyangkut keamanan dan pengelolaan keuangan. Jika kita lihat dalam konteks negara, umumnya negara yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sudah akan sangat bergantung kepada negara-negara

yang memiliki kemampuan struktural ilmu pengetahuan terutama menyangkut teknologi untuk mendapatkan hal tersebut mereka juga harus membayar dengan imbalan tertentu, baik Modal maupun kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan kebijakan yang mempunyai sumber daya pendidikan.

Jika kita perhatikan apa yang dikemukakan oleh Susan strange ini sangat relevan dengan kondisi perekonomian Internasional sekarang ini. Negara-negara yang mempunyai empat faktor tersebut, seperti negara-negara G-3, ataupun G 8 dapat dengan mudah melakukan intervensi terhadap negara yang tergantung terhadap empat struktural power (Security, Production, Financial and Knowledge). Dimana ini dapat dilakukan melalui hubungan kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral. Ataupun dengan cara yang lebih halus melalui Institusi-institusi Internasional, seperti WTO, IMF, dan World Bank.

D. HIPOTESA

“Perkembangan perdagangan yang semakin global, maka peran dan fungsi sebuah

1. ... ekonomi basis maupun instrument perdagangan dunia itu

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kekuatan dan peran serta Negara dalam pengembangan dan ekonomi global.
2. Untuk penambahan wawasan dan pola pikir penulis tentang konstelasi ekonomi politik Internasional yang berkembang sekarang ini.
3. Syarat bagi penulis dalam menyelesaikan study dan guna meraih gelar kesarjanaan SI di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pembuatan penulisan ini adalah dengan melalui studi-studi kepustakaan (Library Research) yaitu suatu cara mendapatkan bahan dan data berdasarkan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan dan data tertulis yang dapat diperoleh baik dalam bentuk buku, majalah, down load internet, jurnal dan artikel.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah melaksanakan analisa, maka penulis memberikan batasan jangkauan penulisan dimulai pada tahun 1990 hingga tahun 2004. namun tidak tertutup kemungkinan adanya data-data sebelum dan sesudah jangkauan penelitian yang mendukung dalam penulisan ini

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan ini dibagi dalam 5 Bab dan disusun secara sistematis yaitu:

- BAB I Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan Penelitian dan Sistematika penulisan.
- BAB II Lahirnya Ideologi Neo-Liberalisme: Sejarah berkembangnya ideologi Neo-beralisme, mnculnya aliran kanan Baru, faktor pendorong lahirnya Neo-liberalisme, SAP (Structural Adjustment Programme), Neo-Liberalisme kampanye anti-negara, IMF dan World Bank produsen kemiskinan, WTO sebagai institusi yang memelihara kepentingan negara maju.
- BAB III TNC aktor ekonomi Neo-Liberalisme; Berakhirnya zaman Negara-bangsa; Defenisi TNC, TNC pengganti Negara-Bangsa, Internasionalisasi modal dan perburuan keuntungan, Foreign Direct Investment (FDI) dan Trans-Nasional Cooperation (TNC), TNC bentuk Imperialisme Baru (*New Imperialism*); Meleburnya kekuasaan keuangan, industri dan birokrasi,
- BAB IV Signifikansi peran Negara dalam Perekonomian Global: Negara sebagai Regulator dan protektor ekonomi, Militer alat ekspansi ekonomi, Ketertarikan perusahaan

dinegara Maju

transnasional (TNC) terhadap negara, Perputaran modal hanya terpusat